



Dinamika Implementasi Pengelolaan Destinasi Wisata dan Sumber Daya Manusia : Studi Kasus Pandangan Badan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah

Syakira Edriamarsha Firdaus¹, Theresia Valentiana Dewi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 01 Juni 2024

Revised: 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

Management of tourist destinations and human resources (HR) in the tourism context is an important aspect to achieve sustainability in the tourism sector. This research aims to explore the dynamics of implementing tourism destination management and human resources, with a focus on the views of the Regional Tourism Board of Central Java Province. This research method uses empirical law with case studies as the main design. Data was collected through interviews with representatives from the Regional Tourism Agency, as well as analysis of documents related to tourism policies and programs in Central Java Province. The results of this research highlight various aspects of implementing tourist destination management, including planning, infrastructure development, promotion and environmental conservation efforts. Apart from that, this research also discusses challenges in managing tourism human resources, including skills, training and workforce management. The views of the Regional Tourism Board of Central Java Province illustrate their efforts to increase the competitiveness of regional tourist destinations, pay attention to sustainability, and optimize tourism's contribution to the local economy.

Keywords: *Tourism Management, Government, Central Java*

(*) Corresponding Author: syakiramrsha@students.unnes.ac.id

How to Cite: Firdaus, S. E., & Dewi, T. V. (2024). Dinamika Implementasi Pengelolaan Destinasi Wisata dan Sumber Daya Manusia : Studi Kasus Pandangan Badan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12813298>.

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah kunci pembangunan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Pariwisata adalah sektor unggulan yang mampu memberikan pemasukan bagi negara. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dikatakan bahwa “kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.”

Pariwisata semakin mendapatkan perhatian pemerintah selain untuk menambah pemasukan negara juga untuk meningkatkan daya saing nasional. Sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat



Ekonomi ASEAN, terdapat 15 isu yang dikembangkan salah satunya adalah pengembangan kepariwisataan, yang berfokus pada:¹

- a. pengembangan destinasi wisata;
- b. pengembangan acara pariwisata.

Pengembangan pariwisata dilakukan secara serempak mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebagaimana Provinsi Jawa Tengah juga menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.

Walaupun begitu, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait sektor pariwisata. Hal ini tercermin dalam rencana strategis Dinas Pariwisata untuk periode 2016-2021, di mana terdapat isu-isu kritis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan baik dalam kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan manajemen usaha pariwisata yang belum memiliki daya saing yang memadai. Selain itu, masih terdapat kendala dalam koordinasi untuk mencapai sinkronisasi dalam pembangunan di bidang kepariwisataan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika implementasi pengelolaan destinasi wisata dan SDM, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Badan Pariwisata Daerah, pemangku kepentingan terkait, dan peneliti lainnya dalam memajukan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Tengah dan mungkin juga di tempat-tempat wisata lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sumber wawancara dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur dan Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan penggabungan dari dari 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Struktur sumber daya manusia dalam dinas ini terdiri atas 250 orang dengan pembagian bidang sebagai berikut :²

¹ Istiyani, I., & Yuniningsih, T. (2019). ANALISIS KINERJA ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS DI UPTD OBYEK WISATA CANDI GEDONGSONGO). *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(1), 142-180.

² Website Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, <https://disporapar.jatengprov.go.id/content/sdm-disporapar>

No	Golongan	Jumlah
1	Sekretariat	68
2	Bidang Keolahragaan	23
3	Bidang Kepemudaan	24
4	Bidang Pemasaran Pariwisata	20
5	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	22
6	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif	21
7	UPT Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	30
8	UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	42
Jumlah		250

Pembangunan pariwisata saat ini diarahkan kepada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. hal tersebut karena kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan terarah pada penggunaan sumberdaya alam dan penggunaan sumber daya manusia untuk jangka waktu panjang.³ Oleh karena itu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki tugas yaitu :

1. Pelaksanaan Kebijakan:
Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat provinsi.
2. Monitoring dan Evaluasi:
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan program di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
3. Pelayanan Publik:
Memberikan pelayanan publik terkait dengan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata kepada masyarakat dan pihak terkait.
4. Advokasi:
Menjadi advokat bagi kepentingan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata di tingkat provinsi.

Dengan menjalankan tugas dan fungsi ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berperan penting dalam pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor-sektor tersebut.

Pengelolaan Destinasi Wisata dan Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Dalam mengevaluasi kinerja suatu organisasi, terdapat berbagai dimensi yang dapat diambil sebagai acuan. Dalam konteks penelitian ini, dimensi-dimensi yang menjadi fokus meliputi kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan belum mencapai tingkat optimal, terutama pada aspek sarana dan prasarana yang masih kurang baik baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun, pengelolaan destinasi wisata dan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mencerminkan upaya serius untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan menjaga keberlanjutan sektor ini.

³ Musaddad, A. A., Rahayu, O. Y., Pratama, E., Supraptiningsih, S., & Wahyuni, E. (2019). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 2(1).

Berikut adalah deskripsi mengenai pengelolaan destinasi wisata dan SDM oleh Dinas tersebut:

a. Pengelolaan Destinasi Wisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan serta program terkait pengelolaan destinasi wisata di wilayah tersebut. Mereka secara aktif terlibat dalam:

1. Perencanaan Strategis Destinasi:

Menyusun rencana strategis untuk pengembangan destinasi wisata, termasuk identifikasi potensi wisata, perencanaan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

2. Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan destinasi wisata, seperti jalan, sarana akomodasi, dan fasilitas publik lainnya.

3. Promosi dan Pemasaran:

Melakukan kampanye promosi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas destinasi wisata Jawa Tengah, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁴

4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan destinasi wisata.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia:

Dalam hal pengelolaan SDM di sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, Dinas ini berperan aktif dalam:

1. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

Menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM di sektor-sektor terkait, termasuk pelatihan untuk pelaku pariwisata dan pemuda.

2. Manajemen Tenaga Kerja

Mengelola kebutuhan dan distribusi tenaga kerja di sektor-sektor ini, memastikan keberlanjutan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam sektor pariwisata dan kegiatan kepemudaan, untuk memastikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Dengan pengelolaan destinasi wisata dan SDM yang efektif, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berperan dalam membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dalam menghadapi tantangan dan peluang telah dilakukan perubahan peran pemerintah dibidang kebudayaan dan

⁴ Tamrin, M. H. (2021). Kolaborasi Membangun Negeri: Studi Kasus Pengembangan Ekowisata Bahari dalam Perspektif Collaborative Governance.

pariwisata yang pada masa lalu berperan sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih difokuskan hanya kepada tugas-tugas pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan dapat berkembang dengan pesat.⁵

Pengembangan pariwisata suatu daerah akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut akan berpengaruh yang signifikan, baik bagi negara tujuan maupun bagi masyarakat lokal. Sehingga peran sektor pemerintah Jawa tengah dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan ini juga dapat membantu dalam mewujudkan pariwisata yang dapat dikenal berbagai daerah dan negara.

KESIMPULAN

Pengelolaan destinasi wisata dan sumber daya manusia oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mencerminkan komitmen yang kuat dalam pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Dinas ini tidak hanya terlibat dalam manajemen infrastruktur pariwisata, perencanaan destinasi wisata, dan pelaksanaan program promosi, tetapi juga aktif dalam pembinaan sumber daya manusia di sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Dengan peranannya, Dinas ini berusaha memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya menciptakan destinasi yang menarik, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal menjadi dasar bagi pengelolaan yang holistik, menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai destinasi pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, I., Sumartias, S., Damayanti, T., & Nugraha, A. R. (2018). Pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan geopark Pangandaran. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217-230.
- Istiyani, I., & Yuniningsih, T. (2019). ANALISIS KINERJA ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS DI UPTD OBYEK WISATA CANDI GEDONGSONGO). *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(1), 142-180.
- Musaddad, A. A., Rahayu, O. Y., Pratama, E., Supraptiningsih, S., & Wahyuni, E. (2019). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 2(1).
- Tamrin, M. H. (2021). Kolaborasi Membangun Negeri: Studi Kasus Pengembangan Ekowisata Bahari dalam Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1)
- Website Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, <https://disporapar.jatengprov.go.id/content/sdm-disporapar>

⁵ Bakti, I., Sumartias, S., Damayanti, T., & Nugraha, A. R. (2018). Pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan geopark Pangandaran. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217-230.